

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Implementasi analisis standar belanja dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh SKPD pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dilaksanakan dengan anggaran berbasis kinerja yang efisien, ekonomis dan efektif. Karena anggaran kegiatan dalam bentuk bimbingan teknis di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagian besar telah menggunakan anggaran yang dikategorikan wajar (7 kegiatan). Namun terdapat 4 kegiatan dari total 11 kegiatan bimbingan teknis yang dinyatakan *overfinance* yaitu penggunaan anggaran yang terlalu tinggi diatas batas maksimal model ASB yang dibuat.
2. Model analisis standar belanja dapat membantu dalam pembuatan kebijakan dan pengelolaan anggaran dalam menyusun rencana anggaran sekaligus mengkaji biaya-biaya apa yang digunakan dalam belanja kegiatan yang dapat menimbulkan pemborosan juga mengevaluasi pelaksanaan anggaran agar efisien dan efektif serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menggunakan anggran berdasarkan model analisis standar belanja maka alokasi anggaran dapat dibagi lebih adil lagi dengan alasan-alasan yang jelas atas biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai denga target dan output yang

dihasilkan. Dengan demikian kenaikan ataupun pengurangan anggaran pada suatu SKPD tidak akan merugikan ataupun mengorbankan SKPD lainnya. Dimana tiap-tiap pengelolaan anggaran mendapat alokasi anggaran yang lebih adil berdasarkan dengan kinerja kegiatan yang dihasilkan.

## 5.2 Saran

1. Sebaiknya SKPD dalam penyusunan anggaran kegiatan setiap tahunnya menerapkan model Analisis Standar Belanja sehingga mempermudah dalam evaluasi anggaran kegiatan yang digunakan. Selain itu juga agar menghindari pemborosan akibat terjadinya *overfinance* dan tidak berjalanya kegiatan sebagai mana mestinya karena *underfinance*.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebaiknya memberikan sosialisasi serta mendorong kepada Kepala SKPD agar menggunakan ASB pada Perencanaan dan Penyusunan anggaran sehingga pada masa mendatang pemborosan anggaran dapat di minimalisir.
3. Efisiensi pelaksanaan anggaran kegiatan dapat dilakukan dari pengaturan lama waktu kegiatan dan tempat kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana prasarana yang ada.
4. Keterbatasan data dalam penelitian ini karena hanya menggunakan data yang bersumber dari RKA-SKPD yang berarti anggaran yang tercantum dalam RKA belum dijalankan atau di implementasikan. Sehingga demi penelitian yang lebih baik lagi, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan data yang telah dijalankan ataupun diimplementasikan oleh tiap-tiap SKPD.

5. Penelitian ini hanya menganalisis standar belanja pada kegiatan bimbingan teknis kabupaten bolmut. Sehingga peneliti selanjutya diharapkan untuk lebih megembangkan model penelitian terkait dengan Analsisi standar belanja yang tidak hanya terfokus pada belanja kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A. M. (2018). Kajian Deskriptif Analisa Standar Belanja ( Asistensi Dan Pelatihan Teknis ) Kabupaten Mamuju Utara Descriptive Study Of Standard Shopping Analysis ( Technical Assistance And Training ) North Mamuju Regency. *Jurnal Sinar Manajemen*, 5(1), 31–37.
- Basuki, Agus Tri, & Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* ( Agus Tri Basuki Dan Nano Prawoto. (2017). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis. P. R. P. Prawoto (Ed.)). Pt Rajagrafindo Persada.
- Cadith, J., & Yulianti, R. (2020). Pengembangan Model Standar Belanja Kecamatan Di Kabupaten Lebak. *Jipags (Journal Of Indonesian Public Administration And Governance Studies)*, 4(1). <https://doi.org/10.31506/jipags.V4i1.7961>
- Darmayasa, I. N. (2013). Analisis Standar Belanja (Asb) Untuk Mencapai Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Kabupaten Jembrana. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi Ke-2*, 17–18.
- Fitra, H., Agustin, H., & Mulyani, E. (2019). Fairness Analysis Of The Technical Guidance Budget Activity, Socialization, And Training Using Activity Based Costing Approach: Empirical Study At The District Office In West Pasaman Regency. *Advances In Economics, Business And Management Research*, 124(38), 167–176. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.065>
- Manalu, Ruth Gok Maria, Heriyanto, M., & Farida, L. (2018). Stans]Dar Belanja (Asb) Pada Penyusunan Anggaran Belanja Bimtek Dan Pelatihan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14.
- Maramis, J. B., Lengkong, V. P. K., Nelwan, O. S., & Jantje L. Sepang. (2019). Human And Non-Human Aspects In The Effectiveness Of The Implementation Of The Shopping Standard Analysis (Asb) On The Village Fund Project In Coastal Areas Of North Minahasa Regency. *International Journal Of Applied Business & International Management*, 4(1), 1–12.
- Nadir, R., Arif, M. R., & Fatmawati. (2020). Modelling Analisis Standar Belanja Dalam Kewajaran Anggaran (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Di Sulawesi Selatan). *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 197–205. <https://doi.org/10.22225/Kr.11.2.1580.197-205>
- Nadir, R., Nasrudin, A. K., & And Sabri Wahab. (2018). Spending Standard Analysis Model In Budget Fairness (An Empirical Study On Wajo Regency). *Advances In Economics, Business And Management Research*, 92(Icame 2018), 410–418.

<https://doi.org/10.2991/ica-me-18.2019.45>

- Nas, U., Su'un, M., & Nasaruddin, F. (2020). Analisis Standar Belanja Dan Kewajaran Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai. *Bongaya Journal For Research In Accounting*, 3(3), 76–82.
- Nasution, Dito Aditia Darma. (2019). *Akuntansi Sektor Publik (Mahir Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah)* (Fungky (Ed.)). Uais Inspirasi Indonesia.
- Nurhena. (2018). *Analisis Penilaian Kewajaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Enrekang*. Unismuh Makassar.
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2021. (N.D.).
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (N.D.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. (N.D.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (N.D.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (N.D.).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional. (N.D.).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/132592/perpres-no-33-tahun-2020>
- UGM), P. Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik (Psekp. (2009). *Penyusunan Analisis Standar Belanja (Pengalaman Praktis Di Pemerintahan Daerah)* (Vol. 53, Issue 9).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah. (N.D.).
- Winerungan, T., Rumat, V. A., & Walewangko, E. N. (2018). Evaluasi Penganggaran Keuangan Daerah Dengan Analisis Standar Belanja (Asb) Tahun 2015-2017 (Studi Kasus Inspektorat Kota Bitung). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(6), 1–14.

<https://doi.org/10.35794/Jpek.19788.19.6.2018>